

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika	28
3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara	29
3.1.3 Badan Pusat Statistik	30
3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	33
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 138, disebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Padang Panjang. Proses penyusunan Renja Kominfo didasarkan pada Perubahan Renstra Kominfo 2019-2023 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan. Selanjutnya Renja ini akan menjadi panduan dan arahan yang jelas bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan bahan dasar

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini antara lain untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; dan
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Selama tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Dari alokasi belanja pada perubahan anggaran sebesar Rp. 9.283.181.978 dapat direalisasikan secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan Rp.8.903.873.832,- atau mencapai 95,91%., dengan kata lain secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, terkait dengan evaluasi pencapaian Renja Tahun 2021, Dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR TAHUN RENSTRA OPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %		100	100	100%	100	100	67%
X-XX-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	64 laporan	0	22	22	100%	21	0	0%
X-XX-01-2.01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	64 laporan	0	22	22	100%	21	43	67%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	0	100	100	100%	100	100	67%
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	14 bulan	0	14	14	100%	14	14	67%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	0	25	25	100%	25	25	67%
X-XX-01-2.02-05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
X-XX-01-2.02-07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun	54 laporan	0	18	18	100%	18	36	67%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54 laporan	0	18	18	100%	18	36	67%
X-XX-01-2.02-08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	0	100	100	100%	100	100	67%
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	4 jenis	0	4	4	100%	4	4	67%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0	4	4	100%	4	4	67%
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan	7 jenis	0	7	7	100%	7	7	67%
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	2 jenis	0	2	2	100%	2	2	67%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 jenis	0	9	9	100%	9	9	67%
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	0	3	3	100%	3	3	67%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	0	3	3	100%	3	3	67%
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	375 ok	0	125	125	100%	126	251	67%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	2,000 ok	0	2,000	2,000	100%	2,000	4,000	67%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	0	100	100	100%	100	100	67%
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	3 Rekening	0	3	3	100%	3	6	67%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jenis	0	3	3	100%	3	3	67%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 orang	0	8	8	100%	8	8	67%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	0	100	100	100%	100	100	67%
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	0	7	7	100%	7	7	67%
X-XX-01-2.09-02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0	7	7	100%	7	7	67%
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	0	1	1	100%	1	1	67%
X-XX-01-2.09-10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Jenis	0	7	7	100%	7	7	67%
2-16-02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50		37.6	37.6	100%	45	45	90%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2-16-02-2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata kunjungan pada laman resmi kominfo Padang Panjang	85000 %	0	76,000	76,000	100%	80,000	80,000	94%
2-16-02-2.01-04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten videotron	2400 Konten	0	750	750	100%	800	1,550	65%
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24 OPD	0	18	18	100%	22	22	92%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 oang	0	5	5	100%	5	10	67%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-16-02-2.01-05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Jenis	0	5	5	100%	5	5	67%
		Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	2,700 rilis	0	800	800	100%	900	1,700	63%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-16-02-2.01-07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Jenis	0	5	5	100%	5	5	67%
		Jumlah pertemuan jumpa pers	16 kali	0	0	0	0%	8	8	50%
		Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	4 edisi	0	0	0	0%	2	2	50%
		Jumlah Layanan Hubungan Media	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-16-02-2.01-12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	6 Kelompok	0	2	2	100%	2	4	67%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah konten positif	40 konten	0	0	0	0%	0	20	50%
		Jumlah media tradisional yang dibina	3 Kelompok	0	1	1	100%	1	2	67%
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	2 kali	0	0	0	0%	1	1	50%
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-16-03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	2.15		2.1	2.1	100%	2.10	2.12	99%
		Indeks Implementasi Layanan SPBE	3.55		3.55	3.55	100%	3.55	3.55	100%
2-16-03-2.02	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi</i>	<i>20 Layanan</i>	0	16	16	100%	18	18	90%
2-16-03-2.02-07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan	0	16	16	100%	18	18	90%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 orang	0	7	7	100%	7	14	67%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 Layanan	0	16	16	100%	18	18	90%
2-16-03-2.02-10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 Jenis	0	7	7	100%	7	7	67%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	14 orang	0	14	14	100%	14	14	67%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-20-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2-20-02-2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	8 Dokumen	0	2	2	100%	3	5	63%
2-20-02-2.01-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	8 Dokumen	0	2	2	100%	3	5	63%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-20-02-2.01-02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan	2 kegiatan	0	0	0	0%	1	1	50%
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	48 orang	0	0	0	0%	24	24	50%
2-21-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik/Layanan SPBE yang Telah Menerapkan tanda tangan Digital	100%		67%	67%	100%	67%	89%	89%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2-21-02-2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	24 ok		1	1	100%	1	2	8%
2-21-02-2.01-02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	24 ok		24	24	100%		24	100%
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 laporan		1	1	100%	1	2	67%
2-21-02-2.01-03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan	2 kegiatan		0	0	0%	1	1	50%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 laporan		0	0	0%	1	1	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2021 sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Kominfo 2018-2023 adalah cukup baik dimana ada beberapa capaian yang sudah melebihi target, sementara ada capaian yang tidak terealisasi sesuai target dalam hal ini terkait SPBE cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa adanya perubahan kebijakan berupa aturan terkait pedoman penilaian SPBE. Lebih lanjut terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian tahun ke-			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	(n) 2022	(thn n+1) 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			1,86	2,65	2,7	2,83	2,67	3,01	2,09	2,25	2,6	
2	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik			71% (Cukup Informatif)	74%	78%	81%	78,8% (Cukup Informatif)	80%	92,3%	93	94	
3.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi			25%	30%	32%	35%	-	33%	58%	83	100	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas konten dan layanan audio visual dan multimedia dalam rangka keterbukaan informasi publik
3. Penyediaan data statistik sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat guna percepatan Satu Data Indonesia.
4. Peningkatan SDM dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

Mengacu pada Renstra 2019-2023, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program dan kegiatan beserta penganggarnya. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan Pagu Indikatif Rp. 7.896.804.236,-. Sementara berdasarkan analisis kebutuhannya masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 8.461.427.776 . Kebutuhan tersebut antara lain untuk memenuhi gaji/tunjangan ASN pada tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp. 3.215.000.000 atau kurang sebesar Rp.564.623.540 dari pagu RKPD. Kekurangan anggaran ini disebabkan dengan penganggaran gaji di RKPD yang disesuaikan dengan kondisi tahun 2022 dimana belum memperhitungkan penambahan gaji untuk 3 orang CPNS. Selanjutnya masih dibutuhkan Belanja Modal pada kegiatan Pengelolaan e Government Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah berupa router, transmitter dan receiver sebesar Rp.33.000.000,-. Hal ini disebabkan pergantian penyedia layanan internet yang membutuhkan upgrade perangkat jaringan. Lebih lanjut perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2023

Kota Padang Panjang

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3,469,722,436	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3,469,722,436	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,650,476,460	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,650,476,460	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	2,650,476,460	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.215.100.000	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				329,283,576	Administrasi Umum Perangkat Daerah				329,283,576	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis 4 Paket	8,147,826	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis 4 Paket	8,147,826	

2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis 2 Jenis 9 Paket	21,112,050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis 2 Jenis 9 Paket	21,112,050	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis 3 Paket	15,023,700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis 3 Paket	15,023,700	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	125 Ok 125 Laporan 2000 Ok	285,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	125 Ok 125 Laporan 2000 Ok	285,000,000	

2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				298,878,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				298,878,400	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan 3 Rekening	110,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan 3 Rekening	110,000,000	
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Jenis 3 Laporan 8 Orang	188,878,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Jenis 3 Laporan 8 Orang	188,878,400	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191,084,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				191,084,000	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	97,984,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	97,984,000	

2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4,780,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4,780,000	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61,876,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61,876,000	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	26,444,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	26,444,000	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	1,751,184,600	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	1,751,184,600	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,751,184,600	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,751,184,600	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	194,428,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	194,428,000	

			Jumlah konten videotron	850 Konten				Jumlah konten videotron	850 Konten		
			Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24 OPD				Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24 OPD		
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 Orang				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 Orang		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	307,310,400	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	307,310,400	
			Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 Release				Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 Release		
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Edisi	1,213,251,200	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Edisi	1,213,251,200	
			Jumlah layanan hubungan media	5 Layanan				Jumlah layanan hubungan media	5 Layanan		
			Jumlah penerbitan majalah serambi	2 Edisi				Jumlah penerbitan majalah serambi	2 Edisi		

			mekkah					mekkah			
			Jumlah pertemuan jumpa pers	8 Kali				Jumlah pertemuan jumpa pers	8 Kali		
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	36,195,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	36,195,000	
			Jumlah KIM yang aktif	2 Kelompok				Jumlah KIM yang aktif	2 Kelompok		
			Jumlah konten positif	20 Konten				Jumlah konten positif	20 Konten		
			Jumlah media tradisional yang dibina	1 Kelompok				Jumlah media tradisional yang dibina	1 Kelompok		
			Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kegiatan				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kegiatan		
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks implementasi layanan SPBE	3.55	2,623,967,200	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks implementasi layanan SPBE	3.55	2,623,967,200	
			Indeks implementasi tata kelola SPBE	2.15				Indeks implementasi tata kelola SPBE	2.15		

2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,623,967,200	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,623,967,200	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	20 Unit 20 Layanan 7 Orang	331,113,600	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	20 Unit 20 Layanan 7 Orang	331,113,600	Belanja Modal penunjang akses isinternet berupa Router, Transmitter dan Receiver
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	2,292,853,600	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	2,292,853,600	

2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	39,980,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	39,980,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				39,980,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				39,980,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 Dokumen 3 Dokumen	29,980,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 Dokumen 3 Dokumen	29,980,000	
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Padang Panjang	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	24 Orang	10,000,000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Padang Panjang	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam meningkatkan mutu statistik daerah yang terintegrasi	24 Orang	10,000,000	

			Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	1 Kegiatan				Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	1 Kegiatan		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	11,950,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	11,950,000	
2 21 02 2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				11,950,000	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				11,950,000	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah pelatihan	1 Laporan 1 Kegiatan	11,950,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	11,950,000	
TOTAL					7,896,804,236	Total				8.461.427.776	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN dan BPS agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo, antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.1.3 Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dan visi misi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Dalam RPJPD Kota Padang Panjang, tahun 2023 merupakan periode lima tahun keempat (2019-2023) Kota Padang Panjang, dimana pada masa ini Kota Padang Panjang berada pada tahap persiapan menuju kondisi Kota yang maju dengan menekankan peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sementara berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2019-2023, pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan mengusung tema **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”**. Sebagai penjabaran visi tersebut dirumuskanlah beberapa misi dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan kota Padang Panjang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
6. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya
7. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, berkaitan erat dengan pencapaian misi ketiga Walikota yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**, yang dirumuskan melalui pencapaian sasaran **“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan.

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
3. Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia.
4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo.

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-5
					2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Reformasi Birokrasi			56,42
		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		2,6
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,15
				indeks implementasi layanan SPBE	2,55
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	100%	
	Meningkatnya Keterbukaan	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik		94%	

		Informasi Publik			
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50%	
		Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi		100%
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	
2.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kominfo	Nilai IKM Kominfo		87
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,15	
			indeks implementasi layanan SPBE	2,55	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	100%	

Selain Indikator Kinerja Utama sebagai dijelaskan di atas, juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020.

Adapun Indikator Kinerja Kunci yang terkait dengan urusan wajib yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	TARGET TAHUN 2023
1	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan dinas kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100%
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintregasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	100%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten /kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	50%
2	Urusan Statistik		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%

	yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	
	b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah ----- x 100%	100%
3	Urusan Persandian		
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	55,4
4	Transparansi dan Partisipasi Publik		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	100%
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total dokumen yang telah dirinci	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, yang merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023, yang meliputi 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,

Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 4 (empat) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.

- a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN sebanyak 14 (empat belas) bulan.
- b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah jenis pengadaan alat alat listrik sebanyak 4 jenis.
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
 - iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah sebanyak 125 ok dan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2000 ok.
- c. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah tagihan rekening yang di bayarkan sebanyak 3 (tiga) rekening yakni rekening listrik, air dan telpon.
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan sebanyak 3 jasa

layanan (kebersihan, sopir dan penjaga kantor) dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (4 orang tenaga kebersihan, 2 orang sopir dan 2 orang penjaga kantor).

- d. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara pajak dan perizinannya sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah jenis alat kantor yang terpelihara sebanyak 7 (tujuh) jenis.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 50%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Rata-rata kunjungan pada laman resmi Kominfo Padang Panjang sebanyak 85.000 kunjungan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :
- i. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah konten videotron sebanyak 850 (delapan ratuslima puluh) konten, Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik sebanyak 24 (dua puluh empat) OPD.
 - ii. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial sebanyak 1000 (seribu) release.
 - iii. Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah jenis media informasi pembangunan daerah sebanyak 5 (lima) jenis, Jumlah

- pertemuan jumpa pers sebanyak 8 (delapan) kali , dan Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah sebanyak 2 (dua) edisi .
- iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator kinerja Jumlah KIM yang aktif sebanyak 2 (dua) KIM, Jumlah media tradisional yang dibina, sebanyak 1 (satu) kelompok, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah konten positif sebanyak 20 (dua puluh) konten .

3) Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks implementasi tata kelola SPBE sebesar 2,15 dan indeks implementasi layanan SPBE sebesar 2,55.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- i. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 20 layanan.
 - ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola sebanyak 7 (tujuh) jenis.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi sebesar 100 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen.
 - ii. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital sebanyak 100 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 dan perkiraan maju anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Anggaran 2024

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.162.21.220.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.162.21.220.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prestasi Mula Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kelemban Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Kelemban Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
2																
2									7,844,874,236							7,844,874,210
2									3,469,722,436							3,467,222,410
2									2,650,476,460							2,637,976,460
2																
2									2,650,476,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen		2,637,976,460	
2									329,283,576						329,283,550	
2																
2									8,147,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen		8,147,820	
2																
2									21,112,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen		21,112,000	
2																
2									15,023,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen		15,023,700	
2																
2									285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 Persen		285,000,000	
2									298,878,400						298,878,400	
2																
2									110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %		110,000,000	
2																
2									188,878,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %		188,878,400	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Pola Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dierdakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Daerah			8 Orang			Umum		yang dipenuhi		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							191,084,000					191,084,000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	7 Unit	100 %	97,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	100 %	97,984,000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	7 Unit	100 %	4,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	100 %	4,780,000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rohabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	1 Unit	100 %	61,876,000			Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	100 %	61,876,000
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rohabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	7 Unit	100 %	26,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan usulan penunjang yang dipenuhi	100 %	26,444,000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1,751,184,600					1,763,884,600	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,751,184,600					1,763,884,600	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah konten video on Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang		50 Persen	1 Dokumen 850 Konten 24 OPD 5 Orang	2339973400 kali	194,428,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50 Persen	194,428,000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang		50 Persen	1 Dokumen 1000 Release	2339973400 kali	307,310,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50 Persen	307,310,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.1.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Pelaksanaan Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kelas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah penerbitan majalah serambi melokah Jumlah pertemuan jumpa pers	Rata-rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang		50 Person	5 Edisi 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	2339973400 kali	1,213,251,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50 Person	1,225,751,200
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendukung/Informasi Program atau Kebijakan Jumlah KMM yang aktif Jumlah konten positif Jumlah media tradisional yang dibina Jumlah pelatihan bako humas yang diadakan	Rata-rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang	50 Person	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten 1 Kelompok 1 Kegiatan	2339973400 kali	36,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50 Person	36,195,000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2,623,967,200				2,623,967,200	
2.16.03.2.02	Penyelenggaraan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,623,967,200				2,623,967,200	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	3,55 Indeks 2,15 Indeks	20 Unit 20 Layanan 7 Orang	20 Layanan	331,113,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	3,55 Indeks 2,15 Indeks	331,113,600	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	3,55 Indeks 2,15 Indeks	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	20 Layanan	2,292,853,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	3,55 Indeks 2,15 Indeks	2,292,853,600	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								39,980,000				39,980,000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								39,980,000				39,980,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								39,980,000				39,980,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	PraKiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		100 Persen 100 Persen	3 Dokumen 3 Dokumen	2 Dokumen		29,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 100 Persen	29,980,000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		100 Persen 100 Persen	24 Orang 1 Kegiatan	2 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen 100 Persen	10,000,000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									11,950,000				11,950,000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									11,950,000				11,950,000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									11,950,000				11,950,000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Pelatihan	Jumlah Pelatihan		100 Persen	1 Laporan 1 Kegiatan	1 kali		11,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	100 Persen	11,950,000
TOTAL										7,896,804,236				7,896,804,210

BAB V

PENUTUP

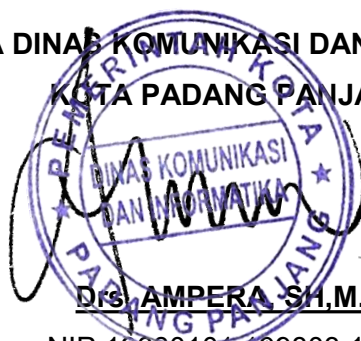
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2022, hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2023.

Untuk anggaran tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juli 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



Drs. AMPERA S.H., M.Si

NIP.19680101 199803 1 010